



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
L K j I P
BAPPEDA
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019**



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| DAFTAR ISI | II |
| DAFTAR TABEL | III |
| DAFTAR LAMPIRAN | IV |
| KATA PENGANTAR | V |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Maksud dan tujuan | 3 |
| C. Dasar Hukum | 2 |
| D. Tugas Pokok dan Fungsi | 4 |
| 1. Tugas Pokok | 4 |
| 2. Fungsi | 5 |
| E. Struktur Organsasi Bappeda Kabupaten Purworejo | 5 |
| 1. Susunan Organsasi | 5 |
| 2. Badan organisasi Bappeda Kabupaten Purworejo | 5 |
| F. Sumber daya Bappeda Kabupaten Purworejo | 8 |
| 1. Susunan Kepegawaian | 8 |
| 2. Perlengkapan | 11 |
| G. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda Kabupaten Purworejo | 12 |
| 1. Aspek Strategis Bappeda Kabupaten Purworejo | 12 |
| 2. Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda Kabupaten Purworejo..... | 14 |
| E. Sistematika Penyusunan LKjIP | 14 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 16 |
| A. Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021 | 16 |
| B. Perencanaan Kinerja Bappeda Tahun 2019..... | 19 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 25 |
| A. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2019..... | 25 |
| 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019..... | 26 |
| 2. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah dilakukan | 28 |
| 3. Analisis Efisiensi penggunaan Sumber daya..... | 35 |
| 4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian pernyataan kinerja | 37 |
| B. Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2019.. | 48 |



| | |
|---|-----------|
| BAB IV PENUTUP | 54 |
| A. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo | 54 |
| B. Faktor Keberhasilan dan Kendala-kendala dalam Pencapaian Tujuan..... | 54 |
| C. Langkah-langkah untuk Mengatasi Kendala-Kendala dalam Pencapaian Tujuan | 58 |

**DAFTAR TABEL**

| | | | Halaman |
|----|------------|---|----------------|
| 1 | Tabel 1.1 | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan | 10 |
| 2 | Tabel 1.2 | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan | 10 |
| 3 | Tabel 1.3 | Kondisi Sarana dan Prasarana | 12 |
| 4 | Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda | 17 |
| 5 | Tabel 2.2 | Target Indikator Program Prioritas Tahun 2019 | 20 |
| 6 | Tabel 2.3 | Program dan Pagu Indikatif Program Th 2019 sebelum perub | 22 |
| 7 | Tabel 2.4 | Program dan Pagu Indikatif Program Th 2019 setelah perub | 23 |
| 8 | Tabel 3.1 | Target dan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2019 | 27 |
| 9 | Tabel 3.2 | Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan yang Akuntable dan Tepat Waktu | 27 |
| 10 | Tabel 3.3 | Indikator Kinerja Sasaran dan Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2019 | 28 |
| 11 | Tabel 3.4 | Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah | 29 |
| 12 | Tabel 3.5 | Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 31 |
| 13 | Tabel 3.6 | Program dan Kegiatan | 32 |
| 14 | Tabel 3.7 | Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan yaitu Presentasi Peningkatan Kapasitas Aparatur | 33 |
| 15 | Tabel 3.8 | Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan yaitu Presentasi Capaian Kinerja dan Keuangan | 33 |
| 16 | Tabel 3.9 | Program dan Kegiatan Indikator Presentasi Penguatan SiDA | 34 |
| 17 | Tabel 3.10 | Realisasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 36 |



| | | | |
|----|------------|--------------------------------|----------|
| | | Analisis Program.Kegiatan | |
| | | Menunjang | |
| 18 | Tabel 3.11 | Keberhasilan/Kegagalan | |
| | | Pencapaian Pernyataan Kinerja | 39 |
| 19 | Tabel 3.12 | Pagu dan Realisasi Tahun 2018 | 48 |
| 20 | Tabel 3.13 | Rekapitulasi Capaian Kinerja | |
| | | Keuangan Tahun 2018 | 48 |
| 21 | Tabel 3.14 | Realisasi Anggaran Bappeda | |
| | | Tahun 2018 | 49 |
| 22 | Tabel 4.1 | Rekapitulasi realisasi kinerja | |
| | | bappeda taun 2019 | 55 |



DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Tahun 2019
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Tahun 2019
3. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2019
4. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021
5. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Purworejo (Murni dan Perubahan) Tahun 2019
6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019
7. Laporan Pengawasan Anggaran definitif per Kegiatan Tahun 2019
8. Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dan Keuangan 31 Desember 2019
9. Laporan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten APBD Propinsi Jawa Tengah 31 Desember 2019



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah S.W.T. yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNYA kepada kita semua sehingga Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo berhasil disusun. Tanpa perlindungan dan rahmat Allah segala kesulitan dapat teratasi. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 25 Tambahan Negara RI Nomor 4437) dan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN mewujudkan tekad bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di seluruh Wilayah Negara Indonesia diharapkan dapat sesuai kondisi, potensi, perkembangan dan tatanan masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintah yang bersih.

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewenangan pengelolaan sumber daya, evaluasi dan analisa capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo menjadi tolok ukur keberhasilan.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas guna mewujudkan Pemerintah yang “*Good Governance*” dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tahun 2019, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

Demikian Laporan Akuntailitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

Purworejo, 31 Januari 2020

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PURWOREJO

Ir. Bambang Jati Asmara, MT., MA

Pembina Tk. I
NIP. 19641025 199703 1 003



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi Dalam rangka melaksanakan era globalisasi di masa ini maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo selaku perencana pembangunan daerah perlu menyelenggarakan pemerintahan yang “*Good Governance*” yang merupakan persyaratan bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam rangka penerapan kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan strategis dan manajemen kinerja. Oleh karena itu diperlukan adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari kolusi, korupsi serta nepotisme menuju ke pemerintahan yang baik.

Terselenggaranya good governance merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Inpres tersebut



mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2016-2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 juga telah dilakukan pengesahan melalui Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.18/499/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/052/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, sehingga secara substantif Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 menjadi tahun kedua, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 menjadi tahun ketiga dan tahun 2019 menjadi tahun keempat atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupten Purworejo dan Renstra Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.



2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

C. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/I/6/8/2003 tentang perbaikan penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Instruksi Bupati Purworejo Nomor 188.5/213/2000 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;
16. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/052 /2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas di tahun 2019, berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi



ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya serta penelitian, pengembangan dan pengendalian.

2. Fungsi

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan pengendalian;
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya serta penelitian, pengembangan dan pengendalian;
3. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan dan pengendalian;
4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya serta penelitian, pengembangan dan pengendalian;
5. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

A. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari :

1. Kepala Badan;



2. Sekretariat;
3. Bidang Perekonomian dan Pengembangan Wilayah;
4. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
5. Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok mengordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum serta keuangan dan kepegawaian.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah yang meliputi produksi, pengembangan dunia usaha, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Fungsi :



- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang produksi;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang pengembangan dunia usaha;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
- Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi pemerintahan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- Fungsi ;
- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang pemerintahan;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang kependudukan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang kesejahteraan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
4. Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian.
- Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan bidang



penelitian, pengembangan dan analisa data, penyusunan perencanaan daerah serta pengendalian evaluasi dan pelaporan.

Fungsi ;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penelitian pengembangan dan analisi data;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan pengendalian di bidang penyusunan perencanaan daerah;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Purworejo

1. Susunan

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, efektif, efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana daerah akan dibawa.



Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya dapat diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Dalam pelaksanaan tugas Tahun 2019 pada bulan Juni terjadi pergantian pejabat struktural sebanyak 4 kali.

Terkait dengan hal tersebut, jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 41 orang PNS dan 4 orang Pegawai Tidak Tetap. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 1.1. berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.1. dengan jenjang eselonering II, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo bermitra dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo melalui 2 (dua) bidang perencanaan yaitu bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. Kedua bidang tersebut mengordinasikan seluruh perangkat daerah dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Satu bidang lain dengan eselonering yang sama.

Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo melalui 2 (dua) bidang perencanaan yaitu Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. Kedua bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam kegiatan perencanaan



pembangunan. Satu bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap kedua bidang diatas yaitu, Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian memberikan dukungan berupa penyediaan data-data dan hasil kajian dan monitoring dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sedangkan Sekretariat menjalankan peran untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Tabel 1. 1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

| No | Uraian | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | Prakom | Staf | Jumlah |
|---------------|---|-----------|------------|-----------|--------|------|--------|
| 1. | Kepala Bappeda | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Sekretariat | - | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 |
| 3. | Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 4. | Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah | - | 1 | 3 | 0 | 6 | 10 |
| 5. | Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| JUMLAH | | 1 | 4 | 11 | 3 | 23 | 41 |

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Bappeda Kab. Purworejo

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV lebih sedikit daripada Bidang yang lain, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya seharusnya memiliki 3 pejabat struktural Eselon IV tetapi pada bulan awal bulan Desember Kepala Sub Bidang Pemerintahan promosi sehingga jumlah eselon IV hanya 2, dan untuk Sekretariat jumlah karyawan lebih banyak dari pada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup besar memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

| No | Uraian | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | Jumlah |
|----|-------------------------|----|----|----|------|------|----|--------|
| 1. | Kepala Bappeda | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2. | Sekretariat | 1 | 5 | - | 5 | - | 1 | 12 |
| 3. | Bidang Pemerintahan dan | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 7 |



| No | Uraian | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | SD | Jumlah |
|---------------|---|----|----|----|------|------|----|--------|
| | Sosial Budaya | | | | | | | |
| 4. | Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah | 2 | 5 | - | 3 | - | - | 10 |
| 5. | Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | 11 |
| | | | | | | | | |
| JUMLAH | | 8 | 19 | 3 | 11 | - | 1 | 41 |

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Purworejo

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.2, tingkat pendidikan karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo yang paling banyak adalah S-1 sebanyak 19 orang (46,34%). Tingkat pendidikan yang relative tinggi merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo secara umum. Jumlah karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 8 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 19,51% dari seluruh karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagai lembaga yang memosisikan dirinya menjadi *Think Thank* nya Pemerintah Kabupaten Purworejo, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai lembaga perencanaan optimal.

2. Perlengkapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo menempati kantor dengan alamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 64 Purworejo terdiri dari gedung kantor berlantai 2 seluas 1192,6 m², ruang pertemuan ada 2, gudang, tempat parkir dan halaman. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :



Tabel 1.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2019

| No | Nama Barang | Banyaknya | Kondisi Barang |
|----|--------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Kendaraan Roda 4 | 5 | Baik |
| 2 | Kendaraan Roda 2 | 18 | Baik |
| 3 | AC | 27 | Baik |
| 4 | LCD | 9 | Baik |
| 5 | Kursi | 198 | Baik |
| 6 | Meja | 96 | Baik |
| 7 | Note Book/Laptop | 33 | Baik |
| 8 | PC Unit | 16 | Baik |
| 9 | Printer | 24 | Baik |
| 10 | Camera | 3 | Baik |
| 11 | Almari Besi dan Kayu | 28 | Baik |
| 12 | Filling Besi | 13 | Baik |
| 13 | Pesawat Telepon/ Faks | 3 | Baik |
| 14 | Layar | 2 | Baik |
| 15 | Sound System | 3 | Baik |
| 16 | GPS | 1 | Baik |
| 17 | Wireless | 1 | Baik |

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Umum
Kepegawaian Bappeda Kabupaten Purworejo

Lokasi Kantor Bappeda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappeda yang memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga dengan sarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan dengan anggaran untuk pemeliharaan yang cukup memadai.

G. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang Dihadapi Bappeda Kabupaten Purworejo

1. Aspek Strategis Bappeda Kabupaten Purworejo

Visi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2021, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG
SEMAKIN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN,
PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG
BERWAWASAN BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI
KERAKYATAN”**



Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religis dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan misi VI, yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintah yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik”**. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, yang meliputi Perekonomian, Pemerintahan



dan Sosiasl Budaya, Ekonomi, dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan visi dan misi Bupati.

2. Permasalahan Utama yang Dihadapi Bappeda Kabupaten Purworejo

Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda Purworejo terkait dengan pelayanan Perencanaan adalah;

- Masih perlunya peningkatan kualitas produk perencanaan daerah;
- Belum berkembangnya budaya inovasi di masyarakat
- Belum adanya kerangka regulasi, kelembagaan dan infrastruktur untuk mendukung SIDA
- Belum berkembangnya penelitian dan pengembangan bidang urusan kewenangan daerah
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan

H. Sistematika Penyusunan LKJIP Bappeda Purworejo

- BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, aspek strategis Bappeda Purworejo dan permasalahan utama yang dihadapi, dan sistematika penulisan LKJIP
- BAB II : Perencanaan kinerja berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Bappeda Purworejo Tahun 2019
- BAB III : Akuntabilitas kinerja berisi tentang capaian kinerja Bappeda Purworejo dan Realisasi Anggaran Bappeda Purworejo tahun 2019
- BAB IV : Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Bappeda Purworejo tahun 2019 dan langkah-langkah yang akan dilakukan



untuk meningkatkan kinerja Bappeda Purworejo tahun 2019.

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Bappeda Purworejo Tahun 2019
2. Target Kinerja RKPD (Murni dan Perubahan) Bappeda Purworejo tahun 2019
3. Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Purworejo (Murni dan Perubahan) Tahun 2019, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bappeda Purworejo Tahun Anggaran 2018 dan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif per Kegiatan Tahun 2019
4. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Purworejo Tahun 2019
5. Rekapitulasi Capaian Bulanan Kinerja Sasaran Bappeda Purworejo Tahun 2019



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2016-2021

Dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016-2021 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo selaku Perangkat Daerah ditetapkan tujuan yang rumusannya menunjukkan suatu kondisi dan target yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

1. Pernyataan Visi

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode 2016-2021 yaitu:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN
SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN BUDAYA, LINGKUNGAN
DAN EKONOMI KERAKYATAN**

2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut di atas telah dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kabupaen Purworejo sebagai gerbang yang religious dan demokratis
- b. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan
- c. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan local
- d. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya dan olahraga
- e. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan
- f. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik



- g. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang

3. Tujuan dan Sasaran Bappeda Tahun 2016-2021

Untuk merealisasikan misi VI Bupati dan Wakil Bupati tersebut, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Dalam rangka pencapaian RPJMD 2016-2021, Bappeda Kabupaten Purworejo sebagai institusi perencana merumuskan tujuan **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”** dan sasaran yang akan dijalankan yaitu :Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu, Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda secara rinci terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN | | | | | | |
|----|--|--|---|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | KONDISI AWAL | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik | Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu | Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu | 96 | 96 | 96 | 96,5 | 96,5 | 97 | 97 |
| | | Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) | Persentase penguatan SIDA | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah | Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: data Subag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum



4. Strategis dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Purworejo

Strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Purworejo harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Purworejo merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, sehingga dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, Bappeda Kabupaten Purworejo menetapkan strategi untuk pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel melalui peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan daerah
- 2) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) melalui optimalisasi jejaring Sistem Inovasi Daerah
- 3) Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata Kerja dan Ketatalaksanaan

Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Purworejo adalah :

1. Peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen dengan meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan teknis, peningkatan kualitas, proses komunikasi publik perencanaan, peningkatan ketersediaan data, dan optimalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan maupun hasil.
2. Optimalisasi jejaring sistem inovasi daerah dengan menyediakan wahana publikasi serta penghargaan atas hasil-hasil inovasi masyarakat dan daerah, meningkatkan kualitas koordinasi dan komunikasi antar jejaring Sistem Inovasi Daerah.
3. Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata Kerja dan Ketatalaksanaan



B. PERENCANAAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tertuang melalui penetapan/ perjanjian kinerja yang disepakati pada tanggal 4 Januari 2019 yang mendasarkan pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 serta Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

Dalam pelaksanaan kinerja tahunan tahun 2019 mengalami perubahan, khususnya pada sasaran dan indikator sasaran karena dilakukan penajaman dan menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, khususnya yang menjadi prioritas di tahun 2019. Disamping itu ada beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Setiap sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program.

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak (*action plan*) yang terdiri dari kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing-masing sasaran.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemetaan dari urusan dan kewenangan Kabupaten yang mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tahun 2018 Bappeda Kabupaten Purworejo melaksanakan Urusan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan dan Fungsi Penunjang



Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan 6 program dan 6 indikator program sebagai berikut:

Tabel 2.2
TARGET INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2019

| PRIORITAS | | BIDANG URUSAN / PROGRAM PRIORITAS | INDIKATOR | RENCANA CAPAIAN |
|---|-----------|--|--|-----------------|
| Tata Kelola pemerintahan yang baik dan kondulsivitas daerah serta pengelolaan bencana | A. | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN | | |
| | 1. | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah | 96,5% |
| Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna | B. | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | |
| | 1. | Program Penelitian dan Pengembangan | Prosentase Cakupan Penelitian dan Pengembangan | 100% |
| Tata Kelola pemerintahan yang baik dan kondulsivitas daerah serta pengelolaan bencana | C. | NON URUSAN | | |
| | 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran | 100% |
| | 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Sarana Prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik | 100% |
| | 3. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Prosentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 100% |
| | 4. | Program Peningkatan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan | Prosentase capaian kinerja dan keuangan | 100% |

Berdasarkan sasaran dan kebijakan yang telah disusun, tahun 2019 merupakan tahun keempat atas pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021 dan tahapan pelaksanaan strategi, dengan program beserta program indikator sebagai berikut :

1. Berdasarkan Sasaran : Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu,

Pada tahun 2019 diupayakan pencapaiannya melalui indikator kinerja Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu dengan target capaian 96,5%.

a. Definisi Operasional atas Indikator Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu mencakup 3 hal yaitu :

1. Akuntabilitas tingkat kabupaten (% realisasi kinerja) dengan bobot 25%, yaitu Akuntabilitas kabupaten/% realisasi kinerja
2. Ketepatan waktu tingkat kabupaten dengan bobot 50% yaitu Ketepatan waktu penyusunan Perencanaan di tingkat kabupaten
3. Ketepatan waktu tingkat perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan Perangkat Daerah

Penjabaran dari sasaran terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu melalui 1 (satu) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Program Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembanguna Daerah dengan target 96,5%.



Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Program Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi dokumen perencanaan umum pembangunan daerah, dokumen perencanaan teknis, dokumen pengendalian dan evaluasi serta dokumen kompilasi data sektoral

Adapun dokumen yang dibutuhkan meliputi :

- a. Dokumen perencanaan umum meliputi : Dokumen RPJMD, RKPD, beserta perubahannya.
- b. Dokumen Perencanaan Teknis adalah : Masterplan, Rencana Aksi, Studi Kelayakan, Perencanaan kebijakan lainnya.
- c. Dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD dan dokumen evaluasi hasil pelaksanaan RKPD serta evaluasi RPJMD

Pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun 2019 dijabarkan melalui 15 (lima belas) kegiatan.

2. Berdasarkan Sasaran : Prosentase penguatan SIDA (Sistem Inovasi Daerah)

Pada tahun 2019 diupayakan pencapaiannya melalui indikator kinerja Cakupan penguatan SIDA dengan target capaian 100%. Tolok ukur kinerja merupakan tahapan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan dalam tahun 2019.

Definisi Operasional atas Indikator kinerja Sasaran Cakupan penguatan SIDA meliputi Sistem Inovasi Daerah, Penyelenggaraan Krenova, dan koordinasi Dewan Riset Daerah kabupaten Purworejo, penataan kelembagaan, jaringan dan sumber daya. Serta pengembangan komitmen dan konsensus, pemetaan potensi dan analisis serta pemberlanjutan penguatan SIDA atau secara ringkas meliputi :

- a. Kebijakan SIDA dengan bobot 40%, meliputi meliputi hasil koordinasi SIDA, data dan Informasi Iptek, dan Penataan jaringan SIDA yang disinergikan dengan RPJMD 2016-2021
- b. Penataan SIDA di tahun 2019 dengan bobot 35% meliputi Penataan Jaringan SIDA dan Penataan Sumber Daya SIDA , dengan Penyelenggaraan krenova di tahun 2019 dengan meliputi penyelenggaraan Kreativitas dan Inovasi masyarakat yang ditujukan pada masarakat Purworejo yang memiliki inovasi dalam segala bidang.
- c. Pengembangan SIDA denga bobot 25%



Target pengembangan SIDA di tahun 2019 dengan membentuk dewan riset daerah (DRD) yang menghasilkan 1 buah dokumen hasil riset. melalui 1 Program Penelitian dan Pengembangan dengan indikator Program Persentase Cakupan Penelitian Pengembangan dengan target 100%.

Definisi Operasional dari Program Penelitian dan Pengembangan dengan Indikator Kinerja Persentase Cakupan Penelitian Pengembangan meliputi Penelitian dan pengembangan yang seharusnya dilaksanakan. Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan di tahun 2019 dijabarkan melalui 3 (tiga) kegiatan.

Secara menyeluruh, baik pelaksanaan program dan kegiatan fungsi penunjang urusan berdasarkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan indikator kerjanya di tahun 2019, dijabarkan melalui 6 (enam) Program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud telah mengalami perubahan dari program kegiatan awal tahun baik berupa penambahan dan pengurangan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019. Perubahan ini merupakan refleksi atas dinamika kondisi dan kebutuhan yang terjadi dalam tahun 2019. Seiring dengan perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tahun 2017 telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Adapun program dan pagu Anggaran Definitif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 sebelum perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.3 :

Program dan Pagu Indikatif Program Tahun 2019 sebelum perubahan

| No. | Urusan / Sasaran | Indikator Kinerja | Program | Pagu Anggaran (Rp) |
|-----|--|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN | | | 2.144.140.400 |
| | Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu | Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.144.140.400 |
| 2. | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | 411.212.200 |
| | Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Persentase penguatan SIDa | Program Penelitian dan Pengembangan | 411.212.200 |
| 3. | NON URUSAN (EX ADMINISTRASI UMUM) | | | 596.901.102 |



| No. | Urusan / Sasaran | Indikator Kinerja | Program | Pagu Anggaran (Rp) |
|-----|--|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Meningkatnya dikungan kinerja perangkat daerah | Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 323.373.102 |
| | | | Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 145.628.000 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 52.000.000 |
| | | | Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 75.900.000 |
| | JUMLAH | | | 3.152.253.702 |

Sumber : Hasil olahan Bappeda

Tabel 2.4 :

Program dan Pagu Indikatif Program Tahun 2019 setelah perubahan

| No. | Urusan / Sasaran | Indikator Kinerja | Program | Pagu Anggaran (Rp) |
|-----------|--|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN | | | 2.916.628.400 |
| | Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu | Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.916.628.400 |
| 2. | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | 391.812.200,00 |
| | Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa) | Persentase penguatan SIDa | Program Penelitian dan Pengembangan | 391.812.200,00 |
| 3. | NON URUSAN (EX ADMINISTRASI UMUM) | | | 781.137.700 |
| | Meningkatnya dikungan kinerja perangkat daerah | Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 419.803.400 |
| | | | Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | 264.851.100 |
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 20.583.200,00 |
| | | | Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 75.900.000,00 |
| | JUMLAH | | | 4.089.578.300 |



Perubahan Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 telah disesuaikan dengan dinamika yang sedang berjalan, dan berupa penambahan atau pengurangan pagu anggaran, penambahan maupun perubahan desain kegiatan dari 6 Program dengan 43 kegiatan menjadi 6 Program dengan 41 kegiatan. Atau telah disesuaikan dengan hasil pembahasan Tim Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019.

Beberapa pertimbangan dan alasan adanya perubahan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Tahun 2019 :

1. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang ditetapkan setelah APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 ditetapkan, berupa Bantuan Keuangan Umum dari Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang sebelumnya terpisah, dalam perubahan anggaran kegiatan yang bersumber dari bankeu dijadikan satu kegiatan yakni Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah. Kegiatan sebelum perubahan antara lain :
 - a. Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)
 - b. Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Purworejo
 - c. Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
 - d. Penyusunan profil Daerah (SIPD)
 - e. Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja (FEDEP)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan pilar ketiga arah kebijakan penguatan tata kelola, Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dalam pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Gambaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2019 dapat dilihat dari capaian sasaran yang telah dilaksanakan.

A. Capaian Kinerja Bappeda kabupaten Purworejo Tahun 2019

Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo adalah perwujudan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Manajemen kinerja yang dibangun secara baik, memerlukan tolok ukur atau indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu pada tahun 2019 Bappeda menetapkan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Implementasi nyata dari proses perencanaan tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Hambatan dan permasalahan seringkali muncul dalam proses tersebut. Proses perencanaan yang baik tentu saja sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di dalam perencanaan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo untuk mencapai sasaran atau target yang



telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*) atau indikator kinerja (*performance indicator*). Untuk dapat mengidentifikasi tingkat capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek, mengingat rencana strategis organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategis jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai terinci detail dalam kegiatan operasional.

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang obyektif dalam pengambilan keputusan.

Pada tahun 2019 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo telah menetapkan 3 (tiga) sasaran, baik yang berupa urusan maupun yang non urusan yang akan dicapai.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Secara umum pelaksanaan kerja di tahun 2019 dapat direalisasikan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, atau sesuai target tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021

Indikator kinerja sasaran Bappeda diuraikan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun 2019 dan ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019 beserta Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2019. Perjanjian



Kinerja tahun 2019 beserta Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2019 yang telah ditandatangani dan merupakan kesepakatan antara Bupati Purworejo selaku atasan langsung dengan Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan rencana strategi yang telah dilaksanakan di tahun 2019, rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran dapat direalisasikan sebesar 93,35% dengan hasil 4 (empat) Interpretasi Kinerja Indikator Sasaran Non Urusan Telah Tercapai, Interpretasi Kinerja Indikator Sasaran untuk Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan juga tercapai. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2019 tersaji pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2019

| No. | Usuran/Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Tahun 2019 | | | Status capaian kinerja Indikator | Interpretasi Kinerja Indikator Sasaran | |
|--|--|-------------------|---|--------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--|----------------|
| | | | | Target | Realisasi | % capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 | Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu | % | 96,5 | 99,89 | 103% | (>) | Telah tercapai |
| | | a. | Akuntabilitas kabupaten /% realisasi kinerja (25) | | | 21,5 | | | |
| | | b. | Ketepatan waktu kab (50) | | | 50 | | | |
| | | c. | Ketepatan waktu perangkat daerah (25) | | | 25 | | | |
| FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | |
| | Penguatan Sestim Inovasi Daerah (SIDa) | 1 | Persentase penguatan SIDa | % | 100 | 100 | 100 | = | Telah tercapai |
| | | a. | Kebijakan SIDa (20) | | | 20 | | | |
| | | b. | Penataan SIDa (25) | | | 25 | | | |
| | | c. | Pengembangan SIDa (55) | | | 55 | | | |



| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|------------|------------|---|-----------------------|--|
| NON URUSAN | | | | | | | | | |
| Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah | 1 | Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah | % | 100 | 100 | 100 | = | Telah tercapai | |

Sumber : Hasil olahan Bappeda

Adapun rincian realisasi sasaran dan program beserta program indikator sebagai berikut :

Berdasarkan Sasaran : Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu, Target dan realisasi kinerja tahun 2019 tergambar dengan tabel 3.2:

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran

Terwujudnya Perencanaan yang Akuntabel dan Tepat Waktu

| No. | Urusan / Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Kinerja Tahun 2019 | | | Status capaian kinerja Indikator | Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran | |
|-----|--|-------------------|---|--------------------|-------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | | Target | Realisasi | % Capaian | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | |
| | Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 | Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu | % | 96,5 | 99,89 | 103 | (>) | Telah tercapai |
| | | a. | Akuntabilitas kabupaten /% realisasi kinerja (25) | | | 21,5 | | | |
| | | b. | Ketepatan waktu kab (50) | | | 50 | | | |
| | | c. | Ketepatan waktu perangkat daerah (25) | | | 25 | | | |

Sumber : Hasil olahan Bappeda

2. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum Penetapan/Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2019 ditetapkan



melalui 3 urusan dengan 3 sasaran, didukung 6 program yang dijabarkan menjadi 41 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3:
Indikator Kinerja Sasaran dan Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2019

| No | Urusan / Sasaran | Indikator Kinerja | Jumlah Program | Jumlah Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian Keuangan (%) | Capaian Fisik (%) |
|----|--|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu | Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu | 1 | 15 | 2.916.628.400,00 | 2.733.653.146,00 | 93,73 | 100,00 |
| 2 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | |
| | Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Persentase penguatan SIDa | 1 | 3 | 391.812.200,00 | 369.965.873,00 | 94,42 | 100,00 |
| 3 | NON URUSAN (EX ADMINISTRASI UMUM) | | | | | | | |
| | Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah | Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah | 4 | 23 | 781.137.700,00 | 714.152.708,00 | 91,42 | 100,00 |
| | JUMLAH | | 6 | 43 | 3.413.709.628 | 3.274.718.301 | 95,93 | 100,00 |

Sumber : Hasil olahan Bappeda

Berdasarkan realisasi yang telah dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan Rencana strategis Tahun 2016-2021 di tahun 2019, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung atas keberhasilan maupun kegagalan serta langkah-langkah yang dilakukan sebagai solusi atas kendala yang dihadapi, Adapun analisis terhadap masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

- a. **Berdasarkan Sasaran : Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu**



Sasaran ini diimplementasikan dalam 1 indikator kinerja melalui pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan dengan 1 indikator kinerja yang didukung 1 Program dengan 15 kegiatan dan Non Urusan dengan 4 indikator kinerja yang didukung 4 program dengan 23 kegiatan dengan perincian untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

a). Indikator Kinerja Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah didukung 1 Program dengan 15 kegiatan dengan program dan kegiatan :

Tabel 3.4

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

| | |
|----|--|
| 1 | Penyusunan RKPD |
| 2 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan |
| 3 | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian |
| 4 | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah |
| 5 | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya |
| 6 | Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) |
| 7 | FEDEP (Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja) (Bankeu) |
| 8 | Nangkis (Penanggulangan Kemiskinan) (Bankeu) |
| 9 | Penyusunan Neraca Bahan Pangan |
| 10 | Penyusunan Nilai Tukar Petani |
| 11 | Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD |
| 12 | Penyusunan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 13 | Pengembangan Information and Communication Technology (ICT) untuk perencanaan Pembangunan Daerah |
| 14 | Fasilitasi IPDMIP |
| 15 | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |



1) Faktor Pendukung Keberhasilan :

- ❖ Adanya payung hukum untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
- ❖ Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan
- ❖ Posisi Bappeda selaku perencana daerah dapat dimanfaatkan kewenangannya untuk melakukan intervensi terhadap capaian kinerja daerah
- ❖ Proses perencanaan pembangunan dipublikasikan sebagai acara yang menarik
- ❖ SDM yang semakin memahami peran dan proses perencanaan pembangunan daerah
- ❖ Adanya ketersediaan anggaran, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Purworejo maupun APBD Provinsi Jawa Tengah
- ❖ Adanya komitmen semua pihak untuk melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai ketentuan.
- ❖ Adanya dukungan 1 program dan 15 kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan pembangunan.

2) Hambatan / masalah :

- ❖ Belum semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah
- ❖ Penggunaan e-perencanaan pembangunan belum dapat dilakukan secara maksimal karena terkendala aplikasi dan jaringan komunikasi.
- ❖ Arah pembangunan daerah belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh SKPD dan pihak terkait
- ❖ Adanya regulasi dalam perjalanan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

3) Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
- ❖ Kerjasama dengan BPKP dan beberapa pihak untuk peningkatan dan perbaikan Sistem Perencanaan



- ❖ Koordinasi dan pembinaan tentang arah dan tujuan pembangunan daerah dengan SKPD dan pihak terkait
- ❖ Penyusunan data dasar pembangunan pada semua SKPD
- ❖ Adanya monitoring dan evaluasi yang intensif untuk mengawal seluruh indikator
- ❖ Penyesuaian terhadap pagu dan kegiatan dengan tetap mengedepankan capaian indikator kinerja Bappeda

b. Indikator Kinerja yang terkait dengan Non Urusan

Indikator tingkat pelayanan administrasi perkantoran dengan 1 program dan 15 kegiatan dengan rincian program dan kegiatan :

Tabel 3.5

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Non Urusan Cakupan layanan administrasi perkantoran

| NON URUSAN | |
|---|--|
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor |
| 7 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah |
| 11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah |
| 12 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor |
| 13 | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih |
| 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| 15 | Pengelolaan dan Penataan Arsip |

Sumber : Hasil Olahan Bappeda



- 1) Faktor pendukung keberhasilan
 - ❖ Kegiatan bersifat rutin
 - ❖ Anggaran yang tersedia mampu mengakomodir pelayanan kantor yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
- 2) Hambatan / masalah
 - ❖ Penggunaan fasilitas kantor untuk pelaksanaan tugas sulit dibatasi sedangkan anggaran terbatas
 - ❖ Jumlah personil kurang memadai
- 3) Solusi yang telah dilakukan
 - ❖ Efisiensi dan efektifitas penggunaan fasilitas kantor dengan tetap memprioritaskan kelancaran pelaksanaan tugas
 - ❖ Mengajukan usulan penambahan personil

c) Indikator yang terkait dengan Non Urusan

Indikator cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik dengan 1 program dan 5 kegiatan dengan rincian program dan kegiatan :

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan

| Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur | |
|---|--|
| 1 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor |
| 2 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional |
| 3 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor |
| 4 | Peneliharaan Rutin / Berkala Komputer |
| 5 | Pengadaan sarana dan prasarana kantor |

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

- 1) Faktor Pendukung Keberhasilan.
 - ❖ Dengan adanya gedung baru, sarana dan prasarana kantor cukup memadai dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
 - ❖ Kesadaran semua pihak untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan efisien dan efektif
- 2) Hambatan / masalah :



- ❖ Ketersediaan anggaran belum dapat teralokasikan pada semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan

3) Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas atas kondisi sarana dan prasarana yang ada

d) Indikator yang terkait dengan Non Usaha

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 program dan 1 kegiatan yaitu :

Tabel 3.7

Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan yaitu Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

1) Faktor Pendukung Keberhasilan

- ❖ Terdapat desain kegiatan yang melibatkan seluruh personil

2) Hambatan / masalah :

- ❖ Belum semua kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal dapat diikuti karena jumlah dana terbatas

3) Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal berdasarkan urgensi dan prioritas

e) Indikator yang terkait dengan Non Urusan

Presentase Sistem Capaian Kerja dan Keuangan dengan 1 program dan 2 kegiatan dengan rincian program dan Kegiatan :



Tabel 3.8
Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan yaitu Presentasi Sistem
Capaian Kinerja dan Keuangan

| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | |
|--|---|
| 1 | Penyusunan Pelaporan Keuangan |
| 2 | Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan |

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

1) Faktor Pendukung Keberhasilan

- ❖ Merupakan kegiatan rutin
- ❖ Tersedianya aplikasi yang memadai
- ❖ Semua laporan dapat tersusun dan terkirim sesuai ketentuan dan tepat waktu

2) Hambatan / masalah

- ❖ Koordinasi internal masih belum mampu menjamin ketepatan penyampaian data perencanaan dan laporan dari masing-masing bidang
- ❖ Ketersediaan anggaran masih kurang dibanding jumlah laporan yang harus disusun.

3) Solusi yang telah dilakukan

- ❖ Melakukan penyamaan persepsi dan pemahaman untuk kelancaran penyusunan perencanaan dan pelaporan
- ❖ Usulan kepada yang berwenang agar dilakukam penyempurnaan Analisa Standar Biaya (ASB) di tahun mendatang

b. Berdasarkan Sasaran : Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Sasaran ini diimplementasikan dalam Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan 1 indikator kinerja Presentase penguatan SIDa yang didukung 1 program dengan 3 kegiatan sebagai berikut :



Tabel 3.9

Program dan Kegiatan Indikator Presentase Penguatan SIDA

| Program Penelitian dan Pengembangan | |
|-------------------------------------|--|
| 1 | Sistem Inovasi Daerah (SIDA) |
| 2 | Penyelenggaraan KRENOVA |
| 3 | Koordinasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) |

1) Faktor Pendukung Keberhasilan

- ❖ Adanya dukungan berbagai pihak dalam penyusunan Peraturan Bupati Purworejo tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo
- ❖ Hasil penelitian dan Pengembangan dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintah daerah
- ❖ Ada kegiatan DRD yang mendukung program penelitian pengembangan
- ❖ Masuknya SIDA dalam RPJMD 2016-2021

2) Faktor penghambat

- ❖ Belum adanya sinergi yang terkoordinasi oleh seluruh unsur Litbang terkait mulai dari tingkat Pusat hingga ke Daerah
- ❖ Keterbatasan Sumberdaya SDM Kelitbangan
- ❖ Belum terbentuknya Kelompok Kerja SIDA
- ❖ Jejaring dengan perguruan tinggi belum terbentuk
- ❖ Belum dimanfaatkan dan diimplementasikannya hasil-hasil penelitian

3) Solusi

- ❖ Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama kelitbangan dengan pihak terkait
- ❖ Meningkatkan kualitas SDM kelitbangan
- ❖ Menyusun jaringan kerjasama



- ❖ Penguatan kemitraan/jejaring penelitian dan penerapan Iptek dengan berbagai stakeholder lainnya, baik pada OPD. Lembaga Perguruan Tinggi/akademisi

3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan rencana strategi yang telah dilaksanakan di tahun 2019, dengan pemberdayaan dan pendayagunaan PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebanyak 41 orang, 8 orang diantaranya berpendidikan S-2 dan 19 orang berpendidikan S-1, capaian indikator kinerja dapat direalisasikan sebesar 100%. Sedangkan dari sisi penggunaan sumber daya, dari pagu Belanja Langsung sebesar Rp 4.089.578.300,00 dan rata-rata fisik sebesar 100% maka Tingkat Kinerja SKPD sebesar 93,35% dengan Predikat Kinerja SKPD Sangat Tinggi dan signifikan dengan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Capaian fisik lebih tinggi dari penyerapan anggaran, hal ini menunjukkan adanya efisiensi, Upaya ini akan terus dilakukan dan disinergikan dengan tugas dan tanggungjawab yang akan datang.

Realisasi Efisiensi penggunaan sumber daya di tahun 2019 secara kuantitatif sebesar Rp 271.806.573,00,- yang diupayakan melalui kebijakan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan berasal dari :

- a. Uang Sidang dan Honorarium, berdasarkan realisasi kehadiran tim
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah pemberangkatan berdasarkan urgensinya
- c. Jamuan makan dan minum sesuai kebutuhan
- d. Pengganti Uang Transport, berdasarkan realisasi kehadiran peserta
- e. Pembayaran belanja sarana prasarana kantor riil pembelian

Adapun rincian Realisasi Efisiensi penggunaan sumber daya Bappeda Purworejo di Tahun 2019 berasal dari program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 3.10
Realisasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Program dan Kegiatan | Efisiensi |
|------------|--|-------------------|
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 197.000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 7.578.507 |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 153.000,00 |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 0 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100 |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 29.000,00 |
| 7 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 51.000,00 |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 24.600,00 |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 151.800,00 |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 53.895.175,00 |
| 11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 0 |
| 12 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 2.051.000,00 |
| 13 | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 0 |
| 14 | Penyediaan Alat Rumah Tangga | 12.100,00 |
| 15 | Pengelolaan dan Penataan Arsip | 5.100,00 |
| | JUMLAH REALISASI EFISIENSI PROGRAM I | 64.148.382 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | |
| 16 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | 0 |
| 17 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | 0 |
| 18 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | 0 |
| 19 | Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya | 40.800,00 |
| 20 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 2.162.150 |
| | JUMLAH REALISASI EFISIENSI PROGRAM II | 2.202.950 |
| III | Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur | |
| 21 | Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | 444.000 |
| | JUMLAH REALISASI EFISIENSI PROGRAM III | 444.000 |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | |
| 22 | Penyusunan Pelaporan Keuangan | 18.100 |
| 23 | Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan | 171.560 |



| No | Program dan Kegiatan | Efisiensi |
|-----------|--|--------------------|
| | JUMLAH REALISASI EFISIENSI PROGRAM IV | 189.660 |
| V | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 24 | Penyusunan RKPD | 27.270.290 |
| 25 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | 178.830 |
| 26 | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian | 75.923.450 |
| 27 | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah | 37.522.207 |
| 28 | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | 410.714 |
| 29 | Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) | 2.664.200 |
| 30 | FEDEP (Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja) (Bankeu) | 0 |
| 31 | Nangkis (Penanggulangan Kemiskinan) (Bankeu) | 0 |
| 32 | Penyusunan Neraca Bahan Pangan | 2.316.000 |
| 33 | Penyusunan Nilai Tukar Petani | 781.300 |
| 34 | Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD | 696.600 |
| 35 | Penyusunan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.504.000 |
| 36 | Pengembangan Information and Communication Technology (ICT) untuk perencanaan Pembangunan Daerah | 4.564.877 |
| 37 | Fasilitasi IPDMIP | 16.581.800 |
| 38 | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 12.560.986 |
| | JUMLAH REALISASI EFISIENSI PROGRAM V | 182.975.254 |
| VI | Program Penelitian dan Pengembangan | |
| 39 | Sistem Inovasi Daerah (SIDA) | 8.247.029 |
| 40 | Penyelenggaraan KRENOVA | 4.811.953 |
| 41 | Koordinasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) | 8.787.345,00 |
| | JUMLAH REALISASI EFISIENSI PROGRAM VI | 21.846.327 |

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil capaian kinerja di tahun 2019 dengan Predikat Kinerja SKPD Sangat Tinggi, bukan berarti semua pernyataan kinerja dapat dicapai. Hampir seluruh Program dan Kegiatan di tahun 2019 telah dapat dilaksanakan secara maksimal, dari 6 program dan 41 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja Program dan 41 kegiatan dengan rata-



rata capaian kinerja Program 100% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,35% atau target kinerja dapat dituntaskan.

Permasalahan dan kendala yang terjadi selama tahun 2019 adalah dalam hal beberapa kegiatan penyerapan anggaran yang kurang maksimal, namun demikian tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja, sehingga merupakan efisiensi penggunaan sumber dana. Salah satu penyebabnya adalah rapat koordinasi yang dilaksanakan bersamaan sehingga anggaran untuk konsumsi rapat dapat dilakukan efisiensi, ketidakhadiran Tim-tim kegiatan secara lengkap, karena beberapa kegiatan dilaksanakan bersamaan waktunya sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan kondisi riil yang terjadi. Pada pembayaran pengadaan sarana dan prasarana kantor dilakukan secara riil sehingga ada efisiensi.

Rincian lebih lanjut atas analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tersaji pada tabel 3.11 :



Tabel 3.11

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

| | Sasaran | Program dan Kegiatan Indikatif | Indikator dan Kinerja Program (Outcome) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2019) |
|-------------------|--|---|--|--|--|--|----------------------|--|
| | | | | Kinerja | Kinerja | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |
| | | | | | | Kinerja | Kinerja | |
| NON URUSAN | | | | | | | | |
| | Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Surat menyurat | 2.000 surat + 12 bulan dalam 6 tahun | 2.502 surat | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | langganan listrik, air, dan telepon | 4 rekening | 4 rekening dalam 15 bulan | 4 rekening, 12 bulan | 4 rekening, 12 bulan | 4 rekening, 12 bulan |
| | | 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jasa kebersihan kantor | 1 orang x 6 x 12 bulan | 1 orang dalam 15 bulan | 2 org x 12 bulan | 2 org x 12 bulan | 2 org x 12 bulan |
| | | 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Alat Tulis Kantor | 40 jenis x 6 tahun | 80 jenis dalam 15 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | | 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang Cetak dan penggandaan | 7 jenis x 6 tahun | 7 jenis dalam 15 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | | | | 200.000 lembar x 6 tahun | 203.125 lembar | | | |



| Sasaran | Program dan Kegiatan Indikatif | | Indikator dan Kinerja Program (Outcome) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2019) |
|---------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
| | | | | Kinerja | Kinerja | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |
| | | | | | | Kinerja | Kinerja | |
| | 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | komponen listrik | 224 lampu penerangan | 30 buah lampu penerangan | 40 buah lampu penerangan | 40 buah lampu penerangan | 40 buah lampu penerangan |
| | 7 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jasa Sopir kepala selama 12 bulan | 23 jenis + 12 bulan x 4 tahun | | 1 orang | 1 orang | 1 orang |
| | | | | Sewa pengharum ruangan 7 unit x 12 unit | | | | |
| | 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Langganan Koran,Majalah | 3 jenis x 12 bulan x 6 tahun | 6 jenis dalam 15 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | | | | 48 eksemplar | 10 eksemplar dalam 15 bulan | | | |
| | 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Makanan dan minuman harian pegawai | 11 bulan x 6 tahun | 14 bulan | 11 bulan | 11 bulan | 11 bulan |
| | | | | 1.164 orang / kali | 657 orang / kali | | | |
| | | | | 220 orang / kali | | | | |
| | 10 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 120 orang / kali + 12 bulan x 4 tahun | 103 orang / hari | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |



| Sasaran | Program dan Kegiatan Indikatif | | Indikator dan Kinerja Program (Outcome) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2019) |
|---------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Kinerja | Kinerja | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |
| | | | | | | Kinerja | Kinerja | |
| | 11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 60 orang / kali + 12 bulan x 4 tahun | 45 orang/ hari | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | 12 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Jasa keamanan kantor pada hari libur, hari raya dan hari besar lainnya | 120 orang / kali + 12 bulan x 4 tahun | 74 orang/ kali dalam 15 bulan | Jasa keamanan 1 orang, pengamanan libur hari besar | Jasa keamanan 1 orang, pengamanan libur hari besar | Jasa keamanan 1 orang, pengamanan libur hari besar |
| | 13 | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 52 jenis + 12 bulan x 4 tahun | 52 jenis dalam 15 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga | 1 orang x 4 tahun | 16 jenis dalam 15 tahun | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
| | 15 | Pengelolaan dan Penataan Arsip | Pengelolaan dan Penataan dokumen arsip | 1.050 berkas | - | 200 berkas | 200 berkas | 200 berkas |
| | Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | | Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 16 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Luas gedung kantor | 1192,6 m ² x 6 tahun | 1.271,5 m ² | 1192,6 m ² | 1192,6 m ² | 1192,6 m ² |
| | 17 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala | kendaraan dinas/operasional Roda 4, kendaraan dinas/operasional Roda 2 | 35 unit untuk 6 tahun | 11 unit | 5 unit, 23 unit | 5 unit, 23 unit | 5 unit, 23 unit |



| Sasaran | Program dan Kegiatan Indikatif | Indikator dan Kinerja Program (Outcome) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2019) |
|---------|---|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | Kinerja | Kinerja | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |
| | | | | | Kinerja | Kinerja | |
| | Kendaraan Dinas/ Operasional | | 145 unit untuk 6 tahun | | | | |
| 18 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | Air Conditioner, LCD Projector, komputer | 27 unit x 6 tahun | 27 unit dalam 15 bulan | 27 unit, 5 unit, 37 unit | 27 unit, 5 unit, 37 unit | 27 unit, 5 unit, 37 unit |
| | | | 5 unit x 6 tahun | 5 unit dalam 15 bulan | | | |
| | | | 37 unit x 6 tahun | 43 unit dalam 15 bulan | | | |
| 19 | Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya | Pompa Air, Laptop, Printer dan Gerobak Sampah | | | | 1 unit, 5 unit, 2 unit dan 1 unit | 1 unit, 5 unit, 2 unit dan 1 unit |
| 20 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya | | | | 44 potong | 44 potong |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 21 | Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | Aparatur bappeda meningkat kompetensi teknis dan atau manajerial | 20 orang dalam 2 tahun | 12 orang | 10 orang | 10 orang | 10 orang |
| | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Presentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| Sasaran | Program dan Kegiatan Indikatif | | Indikator dan Kinerja Program (Outcome) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2019) |
|---|--------------------------------|---|--|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | Kinerja | Kinerja | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |
| | | | | | | Kinerja | Kinerja | |
| | 22 | Penyusunan Pelaporan Keuangan | Laporan Keuangan SKPD (CaLK, Neraca, LRA, LO, LPE), Penjabaran, Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Pajak, Laporan Prognosis, Laporan Fungsional, Rekonsiliasi internal | 157 dokumen dalam 6 tahun | 13 dokumen | 31 dokumen | 31 dokumen | 31 dokumen |
| | 23 | Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan | RKA/P, DPA/P, Renja/P, Perjanjian Kinerja (PK) Murni/P, RKT/P, LAKjIP, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan Fisik dan Keuangan, Laporan Tribulanan, Laporan Akhir dan Pelaksanaan Forum SKPD dan koordinasi dan konsultasi perencanaan SKPD dan Laporan Aksi PPK dan SPIP | | | 33 dokumen | 33 dokumen | 33 dokumen |
| FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | |
| Meningkatnya Perencanaan yang partisipatif dan akuntabel | | Program perencanaan Pembangunan Daerah | Cakupan optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 24 | Penyusunan RKPD | RKPD Perubahan Tahun n-1 dan RKPD Tahun n | 12 dokumen dalam 6 tahun | 2 dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| | 25 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | Rekomendasi hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purworejo, Pengelolaan SIKEMIS | 6 dokumen dalam 6 tahun | 1 dokumen | 1 Dokumen, 1 SIM | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 1 SIM dalam 6 tahun | | | | | | | | |



| Sasaran | Program dan Kegiatan Indikatif | Indikator dan Kinerja Program (Outcome) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2019) | |
|---------|---|---|--|--|--|-------------------|--|------------------|
| | | | Kinerja | Kinerja | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kinerja | |
| | | | | | Kinerja | Kinerja | | |
| | 26 | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian | Bahan Perencanaan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian selama 12 bulan, Studi Banding ke Swedia | 2 dokumen dalam 2 tahun | 1 dokumen | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| | 27 | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah | Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah selama 12 bulan | 2 dokumen dalam 2 tahun | 1 dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | | | | | | | 20.000 eksemplar | 20.000 eksemplar |
| | 28 | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang disediakan selama 12 bulan | 2 dokumen dalam 2 tahun | 1 dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| 29 | Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL) | Koordinasi kegiatan Bidang AMPL | 6 dokumen | 1 dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | |



| Sasaran | Program dan Kegiatan Indikatif | Indikator dan Kinerja Program (Outcome) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2019) | |
|---------|--------------------------------|--|---|--|--|-------------------|--|-----------|
| | | | Kinerja | Kinerja | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kinerja | |
| | | | | | Kinerja | Kinerja | | |
| | 30 | FEDEP (Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja) (Bankeu) | Rekomendasi Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja | 6 dokumen dalam 6 tahun | 1 dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | 31 | Nangkis (Penanggulangan Kemiskinan) (Bankeu) | Kapasitas kelembagaan TKPKD meningkat | 6 dokumen dalam 6 tahun | 1 dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | 32 | Penyusunan Neraca Bahan Pangan | Neraca Bahan Pangan | 5 dokumen dalam 5 tahun | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | 33 | Penyusunan Nilai Tukar Petani | Nilai Tukar Petani | 5 dokumen dalam 5 tahun | 1 dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | 34 | Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD | Rekomendasi hasil Pengendalian Kebijakan RKPD tahun n , Pengendalian Pelaksanaan RKPD tahun n,Rekomendasi hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun n-2 | 12 dokumen dalam 6 tahun | 2 dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen |
| | 35 | Penyusunan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Data dasar pembangunan untuk analisa perencanaan pembangunan | 6 dokumen dalam 6 tahun | 1 dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |



| Sasaran | Program dan Kegiatan Indikatif | | Indikator dan Kinerja Program (Outcome) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2019) |
|--|-------------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|
| | | | | Kinerja | Kinerja | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | |
| | | | | | | Kinerja | Kinerja | |
| | 36 | Pengembangan Information and Communication Technology (ICT) untuk perencanaan Pembangunan Daerah | Layanan pemeliharaan & pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 6 dokumen dalam 6 tahun | 1 dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen |
| | | perencanaan Pembangunan Daerah | Kapasitas SDM Pembangunan Perencanaan Daerah Meningkatkan | | | | | |
| | 37 | Fasilitasi IPDMIP | Fasilitasi IPDMIP | | | 5 kegiatan | 5 kegiatan | 5 kegiatan |
| | 38 | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | 6 kegiatan | 6 kegiatan | 6 kegiatan |
| FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | |
| Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Program Penelitian dan Pengembangan | | Prosentase Cakupan penelitian pengembangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 39 | Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Hasil koordinasi SIDa, Data dan informasi IPTEK dan Penataan Jaringan SIDa | 3 dokumen | 1 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen |
| | 40 | Penyelenggaraan KRENOVA | Seleksi Krenova | 6 dokumen dalam 6 tahun | 1 dokumen | 1 Dokumen, 1 x Lokakarya, 6 Hadiah untuk pemenang | 1 Dokumen, 1 x Lokakarya, 6 Hadiah untuk pemenang | 1 Dokumen, 1 x Lokakarya, 6 Hadiah untuk pemenang |



| No | Sasaran | Program dan Kegiatan Indikatif | | Indikator dan Kinerja Program (Outcome) | Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja Tahun Lalu (n-2) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (akhir pelaksanaan renja OPD tahun 2019) |
|----|---------|--------------------------------|--|---|--|--|--|-------------------|--|
| | | | | | Kinerja | Kinerja | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Kinerja |
| | | | | | | | Kinerja | Kinerja | |
| | | | | Lokakarya | 6 x lokakarya dalam 6 tahun | 1 x Lokakarya | | | |
| | | | | 3 pemenang Krenova | 20 hadiah untuk pemenang dalam 6 tahun | 3 hadiah untuk pemenang | | | |
| | | 41 | Koordinasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |

sumber : Hasil olahan Bappeda

**B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019**

Berdasarkan rencana strategi yang telah dilaksanakan di tahun 2019 pencapaian indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber dana yang telah ditetapkan secara akuntabel.

Secara umum kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo di tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Tahun 2018

| No | URAIAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % CAPAIAN |
|---------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 3.047.505.524 | 2.552.421.769 | 83,75 |
| 2. | Belanja Langsung | 4.089.578.300 | 3.817.771.727 | 93,35 |
| Total Belanja | | | | |

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

Secara umum capaian keuangan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.552.421.769 atau 83,75% dan belanja langsung sebesar Rp. 3.817.771.727 atau 93,35% atau termasuk kategori Sangat Tinggi, namun demikian, dari 41 kegiatan yang harus dilaksanakan di tahun 2019 rekapitulasi persebaran capaian indikator keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Rekapitulasi Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2019

| No | CAPAIAN KINERJA | JUMLAH KEGIATAN |
|--------|-----------------|-----------------|
| 1. | 0-50% | -0 |
| 2. | 51%-75% | 2 |
| 3. | 76%-90% | 2 |
| 4. | 90-100% | 37 |
| JUMLAH | | 41 |

Sumber : Hasil Olahan Bappeda

Rincian lebih lanjut terhadap realisasi anggaran kegiatan tersaji pada Tabel 3.14 sebagai berikut :



Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2019

| No. | Urusan/Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2019 | | | Program dan Kegiatan | Kinerja Anggaran | | | Keterangan | |
|-----|--|-------------------|---|-----------|--------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % | | Pagu Anggaran | Realisasi | % | | |
| | | | | | Capaian | | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | FUNGSI PENUNJANG URUSAN | | | | FUNGSI PENUNJANG URUSAN | | | | | | |
| | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | PERENCANAAN PEMBANGUNAN | | | | | | |
| | Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 | Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu | 96,5 | 99,89 | 103% | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.916.628.400 | 2.733.653.146 | 93,73 | |
| | | | | | | Penyusunan RKPD | 504.888.800 | 477.618.510,00 | 94,60 | | |
| | | | | | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | 164.000.000 | 163.821.170,00 | 99,89 | | |
| | | | | | | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian | 300.948.000 | 225.024.550,00 | 74,77 | | |
| | | | | | | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah | 411.000.000 | 373.477.793 | 90,87 | | |
| | | | | | | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | 176.955.000 | 176.544.286 | 99,77 | | |
| | | | | | | Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan | 80.000.000 | 77.335.800 | 96,67 | | |



| No. | Urusan/Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2019 | | | Program dan Kegiatan | Kinerja Anggaran | | | Keterangan | |
|-----|----------------|-------------------|------------|-----------|---------|--|------------------|----------------|-----------|------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % | | Pagu Anggaran | Realisasi | % | | |
| | | | | | Capaian | | | Anggaran | Realisasi | | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | (AMPL) | | | | | |
| | | | | | | FEDEP (Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja) (Bankeu) | 4.121.000 | 4.121.000 | 100,00 | | |
| | | | | | | Nangkis (Penanggulangan Kemiskinan) (Bankeu) | 100.000 | 100.000 | 100,00 | | |
| | | | | | | Penyusunan Neraca Bahan Pangan | 85.000.000 | 82.684.000 | 97,28 | | |
| | | | | | | Penyusunan Nilai Tukar Petani | 83.000.000 | 82.218.700 | 99,06 | | |
| | | | | | | Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD | 104.111.200 | 103.414.600,00 | 99,33 | | |
| | | | | | | Penyusunan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 57.315.000 | 55.811.000,00 | 97,38 | | |
| | | | | | | Pengembangan Information and Communication Technology (ICT) untuk perencanaan Pembangunan Daerah | 254.980.000 | 250.415.123,00 | 98,21 | | |
| | | | | | | Fasilitasi IPDMIP | 162.435.400 | 145.853.600 | 89,79 | | |
| | | | | | | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 527.774.000 | 515.213.014 | 97,62 | | |



| No. | Urusan/Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2019 | | | Program dan Kegiatan | Kinerja Anggaran | | | Keterangan |
|-----|--|--|------------|-----------|---------|--|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | Pagu Anggaran | Realisasi | % | |
| | | | | | Capaian | | | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | Program Penelitian dan Pengembangan | 391.812.200 | 369.965.873 | 94,42 | |
| | Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa) | Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa) | 100 | 100 | 100% | Sistem Inovasi Daerah (SIDA) | 92.240.000 | 83.992.971 | 91,06 | |
| | | | | | | Penyelenggaraan KRENOVA | 156.797.600 | 151.985.647 | 96,93 | |
| | | | | | | Koordinasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) | 142.774.600 | 133.987.255 | 93,85 | |
| | NON URUSAN | | | | | | | | | |
| | | 1 Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah | 100 | 100 | 100% | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 419.803.400 | 355.655.018 | 84,72 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 | 2.803.000 | 93,43 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 102.000.000 | 94.421.493 | 92,57 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 20.965.000 | 20.812.000 | 99,27 | |
| | | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 | |
| | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6.415.400 | 6.415.300 | 100,00 | |
| | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.996.300 | 1.967.300 | 98,55 | |



| No. | Urusan/Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2019 | | | Program dan Kegiatan | Kinerja Anggaran | | | Keterangan |
|-----|----------------|-------------------|------------|-----------|---------|--|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | Pagu Anggaran | Realisasi | % | |
| | | | | | Capaian | | | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 11.055.000 | 11.004.000 | 99,54 | |
| | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.204.600 | 3.180.000 | 99,23 | |
| | | | | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | 29.983.800 | 29.832.000 | 99,49 | |
| | | | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 204.840.000 | 150.944.825 | 73,69 | |
| | | | | | | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 2.295.000 | 2.295.000 | 100,00 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 17.055.000 | 15.004.000 | 87,97 | |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 2.999.300 | 2.999.300 | 100,00 | |
| | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2.994.000 | 2.981.900 | 99,60 | |
| | | | | | | Pengelolaan dan Penataan Arsip | 5.000.000 | 4.994.900 | 99,90 | |
| | | | | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 264.851.100 | 262.648.150 | 99,17 | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | 26.999.000 | 26.999.000 | 100,00 | |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | 80.000.000 | 80.000.000 | 100,00 | |



| No. | Urusan/Sasaran | Indikator Kinerja | Tahun 2019 | | | Program dan Kegiatan | Kinerja Anggaran | | | Keterangan |
|---------------|----------------|-------------------|------------|-----------|---------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| | | | Target | Realisasi | % | | Pagu Anggaran | Realisasi | % | |
| | | | | | Capaian | | | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | 44.748.000 | 44.748.000 | 100,00 | |
| | | | | | | Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya | 12.810.800 | 12.770.000 | 99,68 | |
| | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | 100.293.300 | 98.131.150 | 97,84 | |
| | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apratur | 20.583.200 | 20.139.200 | 97,84 | |
| | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | 20.583.200 | 20.139.200 | 97,84 | |
| | | | | | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 75.900.000 | 75.710.340 | 99,75 | |
| | | | | | | Penyusunan Pelaporan Keuangan | 23.000.000 | 22.981.900 | 99,92 | |
| | | | | | | Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan | 52.900.000 | 52.728.440 | 99,68 | |
| JUMLAH | | | | | | | 4.089.578.300,00 | 3.817.771.727,00 | 93,35 | |

Sumber : Hasil olahan Bappeda







BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepada semua perangkat daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai salah satu perangkat daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain sebagai wujud pertanggungjawaban juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, yang dibuat satu tahun sekali setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo secara umum diringkas menjadi 3 hal, yakni:

1. Simpulan tentang Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dan hambatan utama yang dihadapi.
2. Strategi peningkatan kinerja
3. Strategi pemecahan masalah dan langkah antisipati untuk pemecahan masalah.

A. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo

Dilihat dari tabel pada BAB III diatas dimana angka capaian sasaran 93,35% maka tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dikategorikan sangat berhasil. Dalam hal ini juga semua kegiatan tahun 2019 telah dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun tersebut dengan satu kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terjadi kesalahan nomenklatur nama kegiatan, Adapun rekapitulasi penyerapan dan capaian kinerja per program adalah sebagai berikut :



Tabel 4. 1
Rekapitulasi Realisasi Kinerja Bappeda tahun 2019

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan | Pagu Anggaran | | Realisasi | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Keuangan (Rp) | | Fisik (%) |
| | | | | Jumlah | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.144.140.400 | 2.916.628.400 | 2.733.653.146 | 93,73 | 100 |
| 1 | Penyusunan RKPD | 500.000.000 | 504.888.800 | 477.618.510,00 | 94,60 | 100 |
| 2 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | 190.000.000 | 164.000.000 | 163.821.170,00 | 99,89 | 100 |
| 3 | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian | 145.000.000 | 300.948.000 | 225.024.550,00 | 74,77 | 100 |
| 4 | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah | 166.000.000 | 411.000.000 | 373.477.793 | 90,87 | 100 |
| 5 | Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | 171.955.000 | 176.955.000 | 176.544.286 | 99,77 | 100 |
| 6 | Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMPL) | 80.000.000 | 80.000.000 | 77.335.800 | 96,67 | 100 |
| 7 | FEDEP (Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja) (Bankeu) | 70.000.000 | 4.121.000 | 4.121.000 | 100,00 | 100 |
| 8 | PUS (Pendidikan Untuk Semua) (Bankeu) | 25.000.000 | - | | | 100 |
| 9 | Nangkis (Penanggulangan Kemiskinan) (Bankeu) | 25.000.000 | 100.000 | 100.000 | 100,00 | 100 |
| 10 | GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium) (Bankeu) | 15.000.000 | - | | | 100 |
| 11 | Penyusunan Neraca Bahan Pangan | 85.000.000 | 85.000.000 | 82.684.000 | 97,28 | 100 |
| 12 | Penyusunan Nilai Tukar Petani | 83.000.000 | 83.000.000 | 82.218.700 | 99,06 | 100 |
| 13 | Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD | 117.000.000 | 104.111.200 | 103.414.600,00 | 99,33 | 100 |
| 14 | Penyusunan Data Dasar dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 60.000.000 | 57.315.000 | 55.811.000,00 | 97,38 | 100 |
| 15 | Pengembangan Information and Communication Technology (ICT) untuk perencanaan Pembangunan Daerah | 175.000.000 | 254.980.000 | 250.415.123,00 | 98,21 | 100 |
| 16 | SIPD (Penyusunan Profil Daerah) (Bankeu) | 30.000.000 | - | | | 100 |
| 17 | Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah | - | - | | | 100 |



| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan | Pagu Anggaran | | Realisasi | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Keuangan (Rp) | | Fisik (%) |
| | | | | Jumlah | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Fasilitasi IPDMIP | 206.185.400 | 162.435.400 | 145.853.600 | 89,79 | 100 |
| 19 | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | - | 527.774.000 | 515.213.014 | 97,62 | 100 |
| | Penelitian dan Pengembangan | | | | | 100 |
| II | Program Penelitian dan Pengembangan | 411.212.200 | 391.812.200 | 369.965.873 | 94,42 | 100 |
| 1 | Sistem Inovasi Daerah (SIDA) | 100.000.000 | 92.240.000 | 83.992.971 | 91,06 | 100 |
| 2 | Penyelenggaraan KRENOVA | 162.617.600 | 156.797.600 | 151.985.647 | 96,93 | 100 |
| 3 | Koordinasi Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) | 148.594.600 | 142.774.600 | 133.987.255 | 93,85 | 100 |
| | Administrasi Umum | | | | | |
| III | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 323.373.102 | 419.803.400 | 355.655.018 | 84,72 | 100 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.803.000 | 93,43 | 100 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 85.834.702 | 102.000.000 | 94.421.493 | 92,57 | 100 |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 19.200.000 | 20.965.000 | 20.812.000 | 99,27 | 100 |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 100,00 | 100 |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 6.000.000 | 6.415.400 | 6.415.300 | 100,00 | 100 |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.996.300 | 1.996.300 | 1.967.300 | 98,55 | 100 |
| 7 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 11.700.000 | 11.055.000 | 11.004.000 | 99,54 | 100 |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.984.000 | 3.204.600 | 3.180.000 | 99,23 | 100 |
| 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 29.983.800 | 29.983.800 | 29.832.000 | 99,49 | 100 |
| 10 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 124.881.000 | 204.840.000 | 150.944.825 | 73,69 | 100 |
| 11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 4.000.000 | 2.295.000 | 2.295.000 | 100,00 | 100 |
| 12 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | 16.800.000 | 17.055.000 | 15.004.000 | 87,97 | 100 |
| 13 | Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 2.999.300 | 2.999.300 | 2.999.300 | 100,00 | 100 |
| 14 | Penyediaan Alat Rumah Tangga | 2.994.000 | 2.994.000 | 2.981.900 | 99,60 | 100 |
| 15 | Pengelolaan dan Penataan Arsip | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.994.900 | 99,90 | 100 |
| IV | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | 145.628.000 | 264.851.100 | 262.648.150 | 99,17 | 100 |
| 1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 20.880.000 | 26.999.000 | 26.999.000 | 100,00 | 100 |



| No. | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan | Pagu Anggaran | | Realisasi | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Keuangan (Rp) | | Fisik (%) |
| | | | | Jumlah | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 100,00 | 100 |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | 44.748.000 | 44.748.000 | 44.748.000 | 100,00 | 100 |
| 4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | - | 12.810.800 | 12.770.000 | 99,68 | 100 |
| 5 | Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya | - | 100.293.300 | 98.131.150 | 97,84 | 100 |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 75.900.000 | 75.900.000 | 75.710.340 | 99,75 | 100 |
| 1 | Penyusunan Pelaporan Keuangan | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.981.900 | 99,92 | 100 |
| 2 | Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan | 52.900.000 | 52.900.000 | 52.728.440 | 99,68 | 100 |
| VI | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 52.000.000 | 20.583.200 | 20.139.200 | 97,84 | 100 |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Aparatur | 52.000.000 | 20.583.200 | 20.139.200 | 97,84 | 100 |
| | JUMLAH | 3.152.253.702 | 4.089.578.300 | 3.817.771.727 | 93,35 | 100 |

Sumber : Hasil olahan Bappeda

Dilihat dari uraian diatas, dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 100% maka pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dikategorikan sangat berhasil, dalam hal ini juga 43 kegiatan tahun 2019 sebelum perubahan dan menjadi 41 kegiatan setelah perubahan telah dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun tersebut. Sedangkan hal-hal yang sifatnya penyempurnaan dapat dilakukan sesuai tahapan beserta solusinya. Adapun capaian kinerja 6 program yang dijabarkan dalam 41 kegiatan telah dilaksanakan sebanyak 41 kegiatan dan rata-rata dicapai kinerja sebagai berikut

B. Faktor Keberhasilan dan Kendala-Kendala dalam Pencapaian

Tujuan.

Tahun 2019 merupakan keempat atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021. Upaya pencapaian target sasaran telah diupayakan secara maksimal dengan hasil memuaskan. Dalam perjalanannya banyak dijumpai adanya faktor-fakotr yang



mendukung keberhasilan pencapaian tujuan maupun kendala-kendala yang dihadapi.

1. Faktor keberhasilan meliputi :
 - a. Ketersediaan anggaran, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang cukup.
 - b. Tersedianya sarana, prasarana, dan fasilitas perkantoran yang memadai untuk mendukung pencapaian kinerja.
 - c. Adanya koordinasi dan kerjasama internal, lintas bidang, serta koordinasi eksternal, lintas SKPD dan lintas daerah yang harmonis.
 - d. Adanya semangat, motivasi kerja dan budaya yang tinggi di Bappeda.
 - e. Mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah telah dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan serta penerapannya tidak mengalami keterlambatan.
 - f. Pada tahun 2019 telah diawali penyusunan data dasar pembangunan yang berasal dari seluruh SKPD sebagai bahan analisa dan kajian rancangan awal pembangunan daerah.
2. Kendala-kendala Dalam Pencapaian Tujuan :
 - a. Masih kurangnya partisipasi dan inisiatif masyarakat, meskipun telah aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
 - b. Masih adanya kegiatan di Bappeda yang bukan merupakan kewenangan Bappeda (Merujuk pada Renstra Bappeda namun dalam perkembangannya terdapat perubahan perundang-undangan).
 - c. Personil perencanaan SKPD sering berganti.
 - d. Sistem perencanaan pembangunan daerah sudah terlaksana dengan menggunakan aplikasi, namun masih sering dijumpai gangguan, baik dari segi jaringan koneksi antar SKPD maupun masalah dari aplikasinya sendiri.
 - e. Program penyusunan RKPD hal ini perlu adanya komitmen dan penyamaan persepsi dengan semua pihak terakait.

C. Langkah-Langkah untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pencapaian Tujuan

1. Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang memadai dan mudah diakses oleh seluruh SKPD.



2. Peningkatan kapasitas SDM dan konsolidasi internal untuk penyamaan persepsi terhadap seluruh aspek perencanaan pembangunan daerah, agar Bappeda dapat mewujudkan perencanaan yang akuntabel dan responsif dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat.
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah antar lintas sektor.
4. Mengintensifkan pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap target pembangunan yang telah ditentukan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bdan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2019 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban, juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Purworejo, 31 Januari 2020

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PURWOREJO

Ir. Bambang Jati Asmara, MT., MA

Pembina Tk. I

NIP. 19641025 199703 1 003